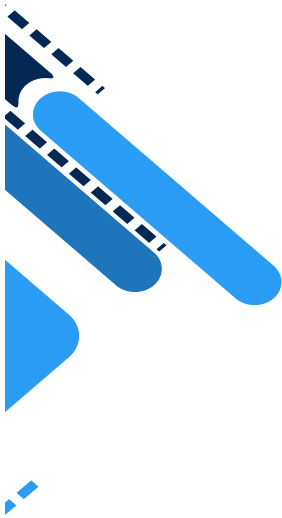




RENSTRA

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2025–2029**



**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang mencakup periode lima tahun. Renstra ini disusun sebagai bentuk operasionalisasi visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah, yang berisi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029, dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra Dinas Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan. Dokumen ini akan memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat tersebut. Proses penyusunannya dilakukan secara terkoordinasi dengan Bappedalitbang Kabupaten Katingan dan pemangku kepentingan terkait guna menjamin keterpaduan dan sinergi antar-perangkat daerah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan Renstra ini. Besar harapan kami, dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi alat pengendalian dan evaluasi atas kinerja pelayanan, serta mendorong tercapainya pelayanan publik yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan.



Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Katingan

WIM, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651110 199103 1 016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI.....	IV
DAFTAR TABEL	VI
DAFTAR GAMBAR	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
STRATEGIS	9
2.1 Gambaran Pelayanan	9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.1.2 Sumber Daya.....	21
2.1.3 Kinerja Pelayanan	255
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan	29
2.1.5 Mitra dalam Pemberian Pelayanan	30
2.1.6 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan	32
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	34
2.2.1 Permasalahan Pelayanan	34
2.2.2 Isu Strategis.....	35
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	48
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	48
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	54
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	58
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan	58
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	102

BAB V PENUTUP.....	106
5.1 Kesimpulan	106
5.2 Kaidah Pelaksanaan	107
5.3 Pengendalian dan Evaluasi.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Sarana Prasarana Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan	23
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan	266
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan.....	288
Tabel 2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan	29
Tabel 2.5 Mitra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan.....	30
Tabel 2.6 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan	32
Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan	3434
Tabel 2.9 Perumusan Isu Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan.....	44
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan	50
Tabel 3.2 Penentuan Strategi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan.....	54
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan.....	55
Tabel 3.4 Pentahapan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan.....	57
Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan	59
Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah	72
Tabel 4.3 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	99
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan.....	102
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan.....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan	20
Gambar 3.1 <i>Logical Framework</i> Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan	52
Gambar 3.2 Pohon Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 menegaskan bahwa Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah untuk periode lima tahun.

Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan teknis-operasional yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Katingan, serta menjadi instrumen untuk menerjemahkan visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam langkah-langkah pembangunan yang sistematis dan terukur. Dokumen ini juga menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah, sekaligus berfungsi sebagai acuan dalam pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan pada lingkup Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan.

Lebih jauh, Renstra memiliki fungsi strategis dalam mengarahkan perangkat daerah agar mampu berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan dilakukan secara sistematis melalui tahapan yang meliputi: persiapan, perumusan rancangan awal, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir, hingga penetapan dokumen Renstra. Seluruh proses disusun dengan mengacu pada ketentuan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan serta Peraturan Kepala Daerah tentang Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan.

Di samping itu, penyusunan Renstra ini juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain: RPJMD Kabupaten Katingan, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Katingan, serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Katingan, sehingga menjamin keterpaduan arah kebijakan pembangunan secara vertikal maupun horizontal.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan regulasi sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan tengah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan 2019–2039;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 6 Seri LD.–/No. 6, TLD.–/No. 98, LL: –7hlm.);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah guna menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran operasional dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah secara sistematis, terarah, terukur, dan akuntabel.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Menjadi acuan strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan serta perwujudan tujuan pembangunan daerah secara terencana dalam periode lima tahun;
2. Memberikan arah yang jelas untuk implementasi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Perangkat Daerah, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan;
3. Memberikan kerangka evaluatif berupa tolok ukur kinerja yang digunakan sebagai dasar pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan Perangkat Daerah;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah selama periode perencanaan, sehingga terwujudnya keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan Tahun 2025-2029 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat landasan konseptual dan normatif penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penjabaran dalam bab ini mencakup:

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini memuat informasi terkait gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang mencakup antara lain:

2.1 Gambaran Pelayanan

- 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi;
- 2.1.2 Sumber Daya;
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan;
- 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan;
- 2.1.5 Mitra dalam Pemberian Pelayanan dan;
- 2.1.6 Kerja Sama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

- 2.2.1 Permasalahan Pelayanan; dan
- 2.2.2 Isu Strategis.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan beserta indikator kinerja, strategi, dan arah kebijakan dalam lima tahun ke depan. Rincian subbab pada Bab III adalah sebagai berikut:

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah; dan
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan beserta indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Selain itu, dicantumkan pula indikator

kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan. Adapun rincian subbabnya adalah:

- 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan; dan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan strategis dari keseluruhan dokumen Renstra, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan Rincian subbab pada Bab V adalah sebagai berikut:

- 5.1 Kesimpulan;
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan; dan
- 5.3 Pengendalian dan Evaluasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dalam bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan memiliki tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang teknologi dan informatika, bidang pengelolaan informasi publik, bidang pengelolaan komunikasi publik dan bidang persandian dan statistik;
2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang teknologi dan informatika, bidang pengelolaan komunikasi publik, bidang pengelolaan komunikasi publik dan bidang persandian dan statistik;
3. Pelaksanaan fungsi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pengelolaan data elektronik;
4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial dan pengembangan kemitraan media;
5. Pengawasan / pengendalian terhadap seluruh penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya Kabupaten Katingan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;

6. Pelaksanaan pembangunan jaringan komunikasi data seluruh sistem pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan;
7. Pelaksanaan penyusunan serta penyiapan aplikasi sistem informasi manajemen;
8. Pelaksanaan pengembangan E-Government dalam pemberdayaan telematika;
9. Pemeberian pertimbangan teknis komputerisasi, telematika, persandian dan aplikasi sistem informasi manajemen kepada Perangkat Daerah;
10. Pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang telekomunikasi dan informatika;
11. Pemberian dan pencabutan perizinan di bidang telekomunikasi dan infomatika yang menjadi kewenangannya;
12. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang telekomunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pelaksanaan pembelian / pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dang fungsi;
14. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
15. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
16. Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah dalam penyelenggaraan di bidang statistik;
17. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kerarsipan;
18. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

19. Pengelolaan pengaduan masyarakat di Bidang Telekomunikasi dan Informatika;
20. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
21. Pemberdayaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional;
22. Penyelenggaraan UPT dan Jabatan Fungsional; dan
23. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Sedangkan susunan organisasi Diskominfo Standi Kabupaten Katingan terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan dan Pelaporan;
3. Bidang terdiri dari :
 - a. Bidang Teknologi dan Informatika;
 - b. Bidang Pengelolaan Informasi Publik;
 - c. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik; dan
 - d. Bidang Persandian dan Statistik.
4. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan. sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dalam bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut:

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 memiliki tugas pokok membantu Bupati Katingan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Teknologi dan Informatika, Pengelola Informasi Publik, Pengelolaan Komunikasi Publik, Persandian dan Statistik. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan juga memiliki uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan teknis perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- b. Penyiapan kebijakan daerah dan kebijaksanaan umum di Bidang pelayanan komunikasi dan informatika serta pemberdayaan informasi masyarakat;
- c. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- d. Penyelenggaraan peningkatan sumber daya manusia di Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- e. Pelaksanaan pembinaan organisasi dinas;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan Kerjasama dengan Instansi terkait serta organisasi lain di Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- g. Penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian dan rumah tangga dinas;
- h. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pembinaan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- i. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan serta pengendalian subbidang dan cabang komunikasi dan informatika;

- j. Monitoring dan analisis pelaksanaan pelayanan komunikasi dan informatika serta pendapat umum daerah; dan
- k. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan

Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan memiliki tugas pokok Pasal 6. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan sekretariat yang berbasis kinerja;
- b. Mengkoordinasikan rencana program kerja dan kegiatan dinas;
- c. Menyusun perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang sekretariat;
- d. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan umum dan teknis dinas;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana-rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit-unit organisasi dilingkungan dinas;
- g. Menyusun rencana kerjasama dinas;
- h. Menyusun penetapan kinerja dinas;
- i. Menyusun laporan keuangan dinas;
- j. Menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- k. Melaksanakan analisis dan menyajikan data dinas;
- l. Menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi kompetensi dan seleksi pegawai dinas;
- m. Menerapkan dan mengembangkan system informasi dinas;
- n. Memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta dampak melaksanakan program dan kegiatan dinas;
- o. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas;

- p. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- q. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;
- r. Mengelola keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
- s. Melaksanakan pelayanan administratif dan fungsional;
- t. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang sekretariat;
- u. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan badan dan sekretariat; dan
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian

Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan memiliki tugas pokok pada Paragraf 1. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWIAN

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian;
- b. Penghimpunan dan penelaahan Peraturan Perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan bidang kepegawaian dan peningkatan SDM;
- c. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada subbagian kepegawaian dan peningkatan SDM;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan penyusunan database pegawai dinas;

- e. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- f. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan dan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- g. Pelaksanaan fasilitas pembinaan pegawai pegawai dan administrasi kepegawaian dinas;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Standar Kompetensi Pegawai Dinas;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran subbagian kepegawian dan peningkatan SDM;
- j. Pembagian tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- k. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- l. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawian;
- m. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- n. Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tidak lanjut hasil pemeriksaan;
- o. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- p. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- q. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SUBBAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan Menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada dinas;
- b. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- c. Penyusunan laporan realisasi keuangan program / kegiatan;
- d. Penyusunan laporan kinerja instansi Perangkat Daerah;
- e. Penyiapan data rencana anggaran belanja tidak langsung dinas;
- f. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggung jawaban dan pembukuan keuangan;
- g. Pembinaan, bimbingan dan pengendalian terhadap bendaharawan;
- h. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;
- i. Penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan akhir tahun;
- j. Penyusunan pelaporan prognosis anggaran;
- k. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan subbagian;
- l. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Teknologi dan Informatika Menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan rencana kerja bidang teknologi dan informatika mengacu pada rencana strategis dinas;
- b. Penyiapan pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang teknologi dan informatika;
- c. Penyiapan perumusan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;

- d. Penyiapan penyelenggaraan sistem berbasis elektronik di Pemerintah Daerah;
- e. Penyiapan penyelenggaraan Sistem Jaringan dan Komunikasi Intra Pemerintah;
- f. Penyiapan ekosistem kota cerdas;
- g. Penyiapan pembangunan dan pengembangan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik;
- h. Penyiapan penyelenggaraan pusat data dan pusat pemulihan bencana pemerintah daerah;
- i. Penyiapan pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi;
- j. Penyiapan penyelenggaraan dan data di bidang telekomunikasi;
- k. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi di Kabupaten Katingan;
- l. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pengembangan infrastruktur aplikasi dan operasional;
- m. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- n. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dinas; dan
- p. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi publik;
- b. Pengawasan opini dan aspirasi publik;
- c. Pengawasan informasi Pemerintah Daerah;

- d. Pelaksanaan layanan informasi publik;
- e. Pelaksanaan fasilitasi koordinasi diseminasi informasi;
- f. Perumusan kebijakan di bidang media publik;
- g. Perumusan pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan kegiatan media publik;
- h. Pelaksanaan pelayanan sarana mobil unit informasi;
- i. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pengelolaan informasi publik;
- j. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- k. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dinas; dan
- m. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan program di bidang pengelolaan komunikasi publik;
- b. Penyiapan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah;
- c. Penyiapan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
- d. Penyiapan pengelolaan media komunikasi publik;
- e. Penyiapan layanan hubungan media;
- f. Penyiapan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- g. Penyiapan manajemen komunikasi krisis;
- h. Penyiapan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;

- i. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan di bidang komunikasi publik;
- j. Pelaksanaan Dokumen Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- k. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- l. Membina, mengawas, mengendalikan, monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

6. BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK

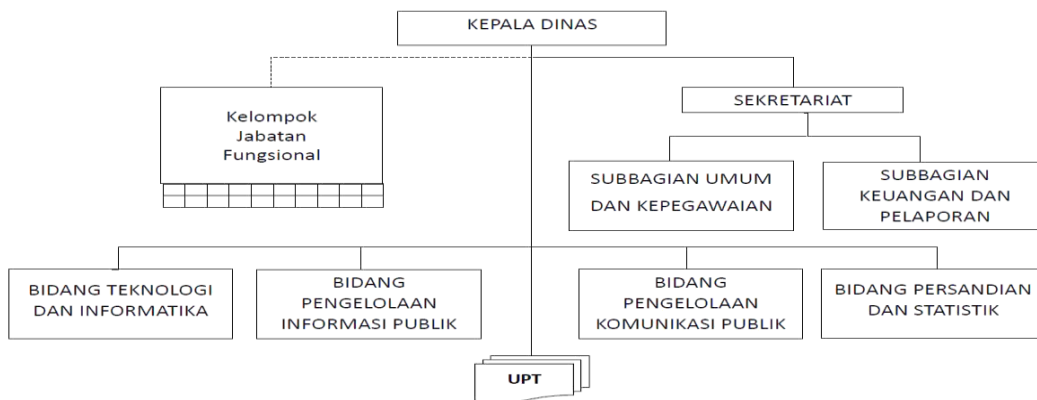
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Persandian dan Statistik Menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan anggaran di bidang persandian dan statistik;
- b. Penyusunan peraturan teknis tata kelola di Bidang Persandian dan Statistik untuk dasar pengelolaan manusia, pengelolaan perangkat lunak, pengelolaan perangkat keras dan pengelolaan jaringan komunikasi di Bidang Persandian dan Statistik;
- c. Penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi di bidang persandian, pengelolaan data elektronik dan statistik antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Katingan.
- d. Penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi dan penyimpanan data di bidang persandian dan statistik;
- e. Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklafikasi;
- f. Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- g. Pengelolaan informasi berklafikasi dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- h. Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintrah daerah;
- i. Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghacuran informasi

berklasifikasi;

- j. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang persandian, pengelolaan data elektronik dan statistik;
- k. Koordinasi pelaksanaan kegiatan persandian, pengelolaan data elektronik dan statistik;
- l. Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- m. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- n. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- o. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- p. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katinga sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disajikan pada bagan berikut:



Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan

2.1.2 Sumber Daya

Pelaksanaan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan harus dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien, sehingga memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya berperan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi perangkat daerah, yang mencakup sumber daya manusia dan asset/sarana prasarana. Dengan permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta adanya berbagai regulasi dari pemerintah, maka diperlukan sumber daya yang memadai dan berkualitas untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan program yang ditetapkan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan menuntut dukungan sumber daya manusia yang memadai, kompeten, profesional dan berintegritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Saat ini, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan memiliki 48 pegawai termasuk PHL. Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan jenjang jabatan struktural dan fungsional adalah sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Eselon II | : 1 Orang |
| 2. Eselon III | : 5 Orang |
| 3. Eselon IV | : 2 Orang |
| 4. Pejabat fungsional Tertentu | : 10 Orang |
| 5. Fungsional Umum | : 6 Orang |
| 6. Fungsional PPPK | : 19 Orang |
| 7. PHL | : 5 Orang |

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten

Katingan berada dalam kondisi **belum ideal**. Sehingga, ke depannya diperlukan langkah-langkah penguatan melalui pengisian jabatan kosong, penataan ulang struktur jabatan, serta peningkatan kapasitas ASN guna mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara optimal.

Selain aspek jabatan, kondisi pegawai juga dapat dilihat dari tingkat kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Tingkat pendidikan menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas individual pegawai dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin kompleks dan berbasis pengetahuan. Jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan sebanyak **48 orang** dapat dirincikan berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut:

1. Sarjana S-2 : 5 Orang
2. Sarjana S-1 : 34 Orang
3. Diploma 3 : 1 Orang
4. SMA Sederajat : 7 Orang
5. SMP Sederajat : 1 Orang

Dari data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan pada jenjang Sarjana S-1, yang mencerminkan keterbatasan dalam memenuhi tuntutan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Hal ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan strategi peningkatan kapasitas melalui pendidikan lanjutan, pelatihan teknis, serta pengembangan karier berbasis kualifikasi dan kebutuhan organisasi.

Selanjutnya, distribusi usia pegawai juga menjadi aspek penting dalam analisis pengembangan sumber daya manusia. Komposisi usia memberikan gambaran mengenai keberlanjutan dan regenerasi aparatur, serta menjadi dasar dalam merancang strategi pengembangan SDM, seperti kaderisasi, alih pengetahuan, dan perencanaan kebutuhan pegawai di masa mendatang. Jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan dapat dirincikan berdasarkan kelompok usia sebagai berikut:

1. Usia < 30 tahun : 5 Orang
2. Usia 30–39 tahun : 16 Orang
3. Usia 40–49 tahun : 16 Orang
4. Usia ≥ 50 tahun : 6 Orang

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kelompok usia 30-39 tahun dan 40-49 tahun sama 16 orang mendominasi komposisi pegawai saat ini. Hal ini menunjukkan regenerasi yang baik / mengindikasikan kebutuhan regenerasi pegawai / menuntut perhatian dalam perencanaan pensiun dan penggantiannya. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis SDM yang mempertimbangkan aspek demografi agar kesinambungan pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan dapat terjaga secara berkelanjutan.

2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan sebagai sarana pendukung pelaksanaan fungsi organisasi dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 2.1 Jumlah Sarana Prasarana Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
1	Genset Cat Generator	1	-	1
2	Kendaraan Roda 4	5	1	6
3	Kendaraan Roda 2	16	1	17
4	Printer	38	19	57
5	Laptop	32	13	45
6	Komputer	15	16	31
7	Lemari Arsip	22	9	31
8	Meja ½ Biro	78	12	90
9	Kursi Putar	5	1	6
10	Kursi Lipat	45	30	75

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
11	Ac	21	2	23
12	Camera	3	10	13
13	Perangkat Zoom	2	-	2
14	Drone	1	-	1
15	CCTV	12	-	12
16	Sound System Set	1	-	1
17	Televisi	9	-	9
18	Lemari Pendingin	3	1	4
19	Dispenser	3	-	3
20	Lcd Proyektor	2	-	2
21	Bangunan Ruang Media Center	1	-	1
22	Bangunan Kantor	1	-	1
23	Bangunan Ruang Server	1	-	1
24	Bangunan Gudang	1	1	2
25	Bangunan Ruang Genset	1	-	1
26	Bangunan Gedung ex TVRI	1	-	1

Sumber data asset DISKOMIFOSTANDI Kab. Katingan Tahun 2025

Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa sebagian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan berada dalam kondisi **tidak layak guna**, baik karena kerusakan fisik, usia pakai yang telah melampaui batas optimal, maupun ketidaksesuaian dengan kebutuhan operasional saat ini. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas pelayanan dan kinerja organisasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pemeliharaan aset yang masih layak, penghapusan aset tidak layak, serta pengadaan sarana baru secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal dalam lima tahun mendatang.

2.1.3 Kinerja Pelayanan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan telah menetapkan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat serta Bidang-bidang terkait, dengan dukungan pendanaan melalui program dan kegiatan yang tersedia. Capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan

No	Indikator	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	IKU															
	Indeks SPBE	0	2.22	2.25	3.02	3.03	0	2.22	2.25	3.02	3.25	0	100	100	100	107.26
2	IKK															
Komunikasi dan Informatika																
	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan Pemda	80	80	80	80	100	80	80	80	80	100	100	100	100	100	100
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0	81.57	82.92	83	84	0	81.57	82.92	83	84	0	100	100	100	100
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	60	70	80	83	100	60	60	81.81	83	100	100	85.71	102	100	100
Statistik																
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	0	12.05	100	100	100	0	12.05	100	100	100	0	100	100	100	100
	Persentase OPD yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
Persandian																
	Indeks KAMI	TAD (Indikator tidak ada karena belum menjadi indikator pada tahun berkenaan)				347	TAD (Indikator tidak ada karena belum menjadi indikator pada tahun berkenaan)				347	TAD (Indikator tidak ada karena belum menjadi indikator pada tahun berkenaan)				100

Sumber Data dari Bidang

Selanjutnya, analisis capaian kinerja perlu dikaitkan dengan tingkat realisasi anggaran sebagai salah satu indikator efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi anggaran selama periode tahun 2020–2024 mencerminkan sejauh mana alokasi sumber daya (*input*) telah dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan luaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang sesuai dengan target kinerja. Adapun rincian realisasi anggaran dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	1.519.771.375	NA	NA	NA	NA	1.277.099.994	NA	NA	NA	NA	84.03	NA	NA	NA	NA
Program Peningkatan Sarana dan Parasarana Aparatur	56.948.000	NA	NA	NA	NA	53.040.447	NA	NA	NA	NA	93.14	NA	NA	NA	NA
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	43.600.000	NA	NA	NA	NA	43.600.000	NA	NA	NA	NA	100	NA	NA	NA	NA
Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa	3.698.969.000	NA	NA	NA	NA	2.970.658.000	NA	NA	NA	NA	80.31	NA	NA	NA	NA
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	NA	4.662.020.360	5.314.487.318	4.847.073.551	5.881.244.130	NA	4.150.690.667	4.992.027.290	4.533.776.328	5.672.278.580	NA	89.01	94.00	94.00	96.00
Program Informasi dan Komunikasi Publik	NA	762.062.370	882.228.472	784.164.518	939.602.296	NA	450.698.667	745.569.395	657.045.569	907.291.977	NA	59.13	85.00	84.00	97.00
Program Aplikasi Informatika	NA	3.535.744.610	4.038.086.838	3.987.796.411	4.328.321.669	NA	3.466.420.884	4.000.789.800	3.963.717.403	4.297.054.995	NA	98.04	99.00	99.00	99.00
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	NA	132.620.000	188.169.837	183.160.000	142.570.664	NA	126.390.700	122.798.525	179.335.870	139.080.610	NA	95.30	65.00	98.00	98.00
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	NA	NA	205.579.694	324.003.180	128.940.000	NA	NA	163.984.000	320.176.180	124.504.420	NA	NA	80.00	99.00	97.00

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran pelayanan merupakan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, serta aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan.

Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan selama periode perencanaan strategis.

Tabel 2.4

Kelompok Sasaran Layanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1.	Komunikasi dan Informatika	- Diseminasi Informasi Publik - Pengelolaan Media Sosial Resmi - Sosialisasi Literasi Digital - Penyampaian Informasi Pembangunan - Layanan Aduan Masyarakat	- Masyarakat Umum - Media Massa - Pelajar/Mahasiswa - Organisasi Masyarakat Sipil - ASN/Perangkat Daerah
2.	Teknologi Informasi	- Pengelolaan Infrastruktur Jaringan TIK - Layanan Pusat Data (Data Center) - Layanan Subdomain dan Email Resmi - Pengembangan Aplikasi Internal - Layanan Helpdesk TIK	- Perangkat Daerah- Sekolah dan Instansi Pendidikan - Rumah Sakit dan Fasilitas Publik - Operator TIK dan Admin Sistem
3.	Statistik	- Pengumpulan Data Statistik Sektoral - Publikasi Data Statistik Daerah - Layanan Permintaan Data - Fasilitasi Integrasi Data antar OPD	- Perangkat Daerah - Peneliti dan Akademisi - Mahasiswa - Pengambil Kebijakan - Publik Umum
4.	Persandian	- Pengamanan Informasi Pemerintah (Enkripsi, TTE) - Audit Keamanan Informasi - Pelatihan Keamanan Siber - Sertifikat Elektronik - Koordinasi Tanggap Insiden Siber	- OPD (Pejabat Penandatanganan Dokumen) - Admin Sistem Informasi - ASN Pengelola Informasi - Tim Keamanan Informasi Daerah

Sumber : Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan

Tabel di atas menggambarkan kelompok sasaran yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan layanan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan pada periode ini. Setiap

kelompok sasaran ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, yang mempengaruhi desain dan implementasi layanan yang diberikan. Penyusunan dan pemilihan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang disediakan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok sasaran, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan dapat menyusun strategi yang lebih terarah dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, hal ini juga memungkinkan penyesuaian kebijakan dan program yang lebih efektif, sehingga pencapaian hasil yang diinginkan dapat lebih optimal.

2.1.5 Mitra Dalam Pemberian Layanan

Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan. Berikut ini adalah rincian mitra perangkat daerah yang berperan dalam mendukung kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan:

Tabel 2.5

Mitra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan

No	Mitra Diskominfostandi	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Komisi Informasi Provinsi/KI Pusat	✓ Pendampingan Keterbukaan Informasi Publik ✓ Mediasi Sengketa Informasi	✓ Peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) ✓ Bimbingan Teknis PPID
2	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	✓ Sertifikasi Keamanan Informasi ✓ Audit Keamanan Siber ✓ Pelatihan Persandian	✓ Penguatan Sistem Keamanan Informasi Daerah ✓ Perlindungan Data Pemerintah Daerah

No	Mitra Diskominfostandi	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
3	Badan Pusat Statistik (BPS)	✓ Data Statistik Makro ✓ Pembinaan Statistik Sektoral ✓ Metadata Statistik	✓ Penguatan Integrasi dan Validitas Data Daerah ✓ Penyusunan Publikasi Statistik
4	Kementerian Kominfo RI	✓ Bimbingan Teknis Literasi Digital ✓ Dukungan Infrastruktur TIK ✓ Program Smart City	✓ Akselerasi Transformasi Digital Daerah ✓ Peningkatan Literasi Digital Masyarakat
5	Dinas Kominfo Provinsi	✓ Koordinasi Program dan Kebijakan ✓ Fasilitasi Pelatihan dan Sosialisasi	✓ Sinkronisasi Program Pusat–Provinsi–Daerah ✓ Peningkatan Kapasitas SDM Daerah
6	Lembaga Penyiaran Publik/Swasta	✓ Penyebarluasan Informasi Daerah ✓ Edukasi Publik melalui Media Elektronik	✓ Mendukung Komunikasi Publik Pemerintah Daerah ✓ Menjangkau Masyarakat Luas
7	Pemerintah Desa/Kelurahan	✓ Akses Informasi Digital ✓ Pemanfaatan Layanan TIK ✓ Literasi Digital Lokal	✓ Perluasan Jangkauan Informasi ✓ Penguatan TIK di tingkat desa/kelurahan
8	Lembaga Pendidikan/Universitas	✓ Penelitian dan Kajian Kebijakan TIK ✓ Magang Mahasiswa ✓ Pelatihan Literasi	✓ Pengembangan Inovasi Layanan ✓ Peningkatan SDM Digital Daerah
9	Media Online/Portal Berita Lokal	✓ Publikasi Informasi Pemerintah ✓ Klarifikasi Informasi Hoaks	✓ Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Diseminasi Program Pembangunan
10	Lembaga Swadaya Masyarakat/NGO	✓ Sosialisasi Informasi Publik ✓ Pemberdayaan Literasi Digital Masyarakat	✓ Kolaborasi dalam Peningkatan Akses dan Partisipasi Masyarakat

Sumber:..

Mitra-mitra yang tercantum dalam tabel ini memiliki peran penting dalam memperkuat penyelenggaraan layanan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan. Kolaborasi yang terjalin antara perangkat daerah dengan mitra ini menunjukkan adanya sinergi yang mendukung pencapaian tujuan bersama, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan mampu tercipta pelayanan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.1.6 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan

Kerja sama daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan memiliki tanggung jawab strategis dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi setiap kerja sama yang dilakukan, baik antar daerah maupun dengan pihak ketiga. Kerja sama ini harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi.

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan bertugas untuk memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama yang dijalin dapat mendukung tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Identifikasi terhadap jenis kerja sama yang telah dilakukan dan evaluasi pelaksanaannya sangat diperlukan untuk menilai efektivitas serta keberlanjutan dari kerja sama tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kerja sama yang dilakukan memberikan manfaat yang optimal bagi daerah dan masyarakat, serta memastikan kesesuaiannya dengan rencana pembangunan daerah yang ada.

Tabel 2.6

Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan

No	Mitra Kerja Sama	Jenis Kerja Sama	Dukungan terhadap kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Badan Pusat Statistik (BPS)	▪ Integrasi data statistik sectoral ▪ Pelatihan statistik	▪ Penguatan penyelenggaraan statistik sectoral ▪ Validasi data untuk perencanaan dan kebijakan
2.	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	▪ Keamanan informasi dan persandian ▪ Pelatihan keamanan siber	▪ Perlindungan data pemerintah daerah ▪ Peningkatan kapasitas SDM bidang persandian
3.	Kementerian Kominfo RI	▪ Literasi digital nasional ▪ Pengembangan ekosistem TIK daerah	▪ Mendorong transformasi digital ▪ Peningkatan indeks literasi masyarakat dan SPBE

No	Mitra Kerja Sama	Jenis Kerja Sama	Dukungan terhadap kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Komisi Informasi Pusat/Provinsi	- Advokasi keterbukaan informasi - Monitoring dan evaluasi PPID	- Meningkatkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik - Penguatan tata kelola informasi publik
5.	Universitas/Lembaga Pendidikan Tinggi	- Penelitian dan pengembangan TIK/statistik - Program magang dan pelatihan	- Inovasi layanan publik - Peningkatan kualitas SDM teknologi dan informasi
6.	Media Massa Online	- Penyebarluasan informasi pembangunan - Kampanye publik	- Meningkatkan jangkauan komunikasi publik pemerintah - Menangkal hoaks dan disinformasi
7.	BUMD/BUMN	- Kolaborasi dalam layanan publik digital - Dukungan infrastruktur TIK	- Penguatan sinergi sektor layanan public - Peningkatan cakupan dan kualitas layanan TIK
8.	NGO/LSM	- Literasi digital masyarakat - Edukasi keterbukaan informasi	- Meningkatkan partisipasi masyarakat - Perluasan akses informasi ke komunitas terpencil
9.	Pemerintah Desa/Kelurahan	- Penguatan PPID desa - Pengembangan aplikasi layanan desa	- Meningkatkan pelayanan informasi di tingkat local - Penguatan layanan digital pedesaan
10.	Pemerintah Provinsi	- Sinkronisasi program TIK dan statistik - Koordinasi kebijakan lintas daerah	Mendukung harmonisasi kebijakan dan program pembangunan bidang komunikasi dan informatika

Kerja sama daerah yang tercantum dalam tabel ini memainkan peran penting dalam mendukung kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kerja sama ini memungkinkan PD untuk memperluas kapasitas dan cakupan layanan yang diberikan, baik melalui penyediaan sumber daya, pembagian tanggung jawab, maupun koordinasi dalam pelaksanaan program-program prioritas. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja lebih efektif, mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta memaksimalkan pencapaian hasil yang diinginkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan Pelayanan

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan memiliki tantangan yang beragam, yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, hingga kendala dalam sistem dan proses pelayanan yang belum optimal. Analisis terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memahami akar penyebabnya, serta untuk merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan dalam penyelenggaraan pelayanan, yang dapat dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut:

Tabel 2.6

**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan**

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya keterbukaan informasi publik	meningkatkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan	Kurangnya sosialisasi keterbukaan informasi
2	Terbatasnya infrastruktur dan jaringan TIK	akses dan pemerataan infrastruktur TIK belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Katingan	- Kondisi geografis dan keterbatasan anggaran - Belum adanya kerja sama strategis dengan provider
3	Rendahnya literasi digital masyarakat	meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat, khususnya di desa dan pinggiran	- Kurangnya pelatihan atau kampanye digital - Minimnya keterlibatan stakeholder pendidikan
4	Pengelolaan data statistik sektoral belum terintegrasi	mewujudkan sistem data statistik sektoral yang terintegrasi dan mudah diakses	- Belum ada standar data antar-OPD - Kurangnya komitmen dalam penginputan dan pembaruan data
5	Keamanan informasi pemerintah daerah belum optimal	meningkatkan pengamanan informasi dan dokumen digital pemerintah	- SDM pengelola persandian terbatas - Rendahnya pemanfaatan TTE dan enkripsi dokumen

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
6	Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi layanan publik	• aplikasi layanan publik yang ada kurang dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat dan OPD	• Sosialisasi dan pelatihan terbatas • Kurangnya integrasi antar aplikasi
7	Sistem pengaduan masyarakat belum dikelola secara maksimal	• mewujudkan sistem aduan masyarakat yang responsif dan terintegrasi	• Kurangnya koordinasi antar instansi menindaklanjuti laporan
8	Minimnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam komunikasi publik	• memperkuat sinergi lintas sektor untuk mendukung komunikasi publik pembangunan daerah	• Tidak adanya forum komunikasi regular • Peran media lokal belum terlibat secara aktif

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan. Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan perangkat daerah ke depan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Penentuan isu strategis pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan didasarkan pada Potensi dan Permasalahan, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, KLHS RPJMD, dan RPJMD Kabupaten Katingan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Isu Strategis	Penjelasan Singkat
1	Masih rendahnya keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah	Perlu penguatan kapasitas PPID, pembinaan, serta peningkatan literasi keterbukaan informasi ke publik.
2	Belum meratanya infrastruktur dan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di seluruh wilayah	Menghambat transformasi digital dan pelayanan publik berbasis TIK, terutama di wilayah pedesaan/terpencil.
3	Rendahnya tingkat literasi digital masyarakat di berbagai kalangan	Diperlukan intervensi edukatif dan kolaboratif untuk mendorong pemahaman dan pemanfaatan teknologi digital.
4	Belum optimalnya pengelolaan dan integrasi data statistik sektoral daerah	Menghambat perencanaan berbasis data dan efektivitas pengambilan kebijakan di tingkat pemerintah daerah.
5	Keamanan informasi dan dokumen elektronik pemerintah belum sepenuhnya terlindungi	Diperlukan penguatan sistem persandian dan pemanfaatan teknologi keamanan informasi secara konsisten.
6	Pemanfaatan aplikasi dan platform layanan publik belum maksimal oleh masyarakat dan perangkat daerah	Kurangnya sosialisasi, pelatihan pengguna, serta integrasi sistem membuat layanan tidak efektif digunakan.
7	Sistem pengelolaan pengaduan masyarakat belum responsif dan terintegrasi lintas sektor	Kinerja aduan publik belum mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan pemerintah secara optimal.
8	Lemahnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung komunikasi publik pemerintah daerah	Kurangnya forum koordinasi dan keterlibatan media serta mitra lokal dalam penyebaran informasi publik.

2.2.2.1 Isu Global

Isu global merujuk pada kondisi, tren, atau tantangan yang bersifat lintas negara dan dapat memengaruhi negara serta daerah. Isu ini mencakup perubahan iklim, krisis ekonomi global, pandemi, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial dan politik internasional yang mempengaruhi perekonomian, lingkungan, dan kehidupan masyarakat di tingkat daerah. Isu global yang

relevan dengan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut:

No.	Isu Global	Relevansi dengan Diskominfostandi
1	Transformasi Digital Global (Global Digital Transformation)	Tuntutan peningkatan layanan publik berbasis digital yang cepat, mudah, dan transparan mendorong optimalisasi SPBE di daerah.
2	Kesenjangan Digital (Digital Divide)	Masih ada ketimpangan akses terhadap internet dan perangkat TIK antara daerah perkotaan dan pedesaan.
3	Keamanan Siber dan Perlindungan Data (Cybersecurity & Data Protection)	Ancaman kebocoran data dan serangan siber mengharuskan penguatan sistem keamanan informasi pemerintah daerah.
4	Hak atas Informasi dan Keterbukaan Publik (Right to Information & Public Transparency)	Keterbukaan informasi menjadi indikator tata kelola pemerintahan yang baik, sejalan dengan tuntutan masyarakat global.
5	Pertumbuhan Ekonomi Digital (Digital Economy Growth)	Digitalisasi informasi dan layanan menjadi pendorong utama produktivitas dan pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi.
6	Inklusi Digital dan Literasi Teknologi (Digital Inclusion & Literacy)	Semua lapisan masyarakat dituntut adaptif terhadap TIK agar tidak tertinggal dalam mengakses layanan dan peluang digital.
7	Percepatan Kota Cerdas (Smart City)	Pemerintah daerah dituntut mengintegrasikan teknologi informasi dalam pelayanan publik, transportasi, dan pengelolaan data.
8	Integrasi dan Interoperabilitas Sistem Informasi Pemerintah (GovTech Integration & Interoperability)	Sistem pemerintahan digital perlu berjalan secara terhubung (interoperable) agar efisien dan mendukung pengambilan keputusan.

2.2.2.2 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga

Analisis terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dilakukan untuk mendukung sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan secara terintegrasi. Isu strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga merupakan bagian integral dari isu nasional yang bersumber dari kebijakan, program prioritas, dan arah strategis nasional. Isu-isu tersebut mencerminkan fokus kerja sektoral yang memiliki implikasi terhadap pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyelaraskan perencanaan dan penganggaran agar mendukung pencapaian sasaran strategis nasional. Adapun isu strategis K/L yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut:

1. Percepatan Transformasi Digital Nasional
2. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
3. Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik
4. Peningkatan Keamanan Siber Nasional dan Perlindungan Data
5. Pembangunan Ekosistem Satu Data Indonesia (SDI)
6. Peningkatan Literasi Digital Nasional
7. Penguatan Infrastruktur TIK untuk Wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar)
8. Perlindungan dan Pemanfaatan Ruang Siber untuk Layanan Publik dan Partisipasi Masyarakat

2.2.2.3 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Telaahan terhadap Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan untuk memastikan keterpaduan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Isu-isu strategis dalam dokumen tersebut mengandung implikasi kebijakan yang relevan bagi perencanaan pembangunan Kabupaten

Katingan khususnya dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan sektoral dan kewilayahan. Oleh karena itu, isu-isu yang tercantum dalam Renstra Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan isu strategis daerah. Berikut ini adalah isu strategis Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan:

1. Keamanan Informasi & Persandian
2. Infrastruktur Digital & E-Government
3. Statistik & Satu Data
4. Indeks PIKP & Informasi Publik
5. Konektivitas & Blank-spot

2.2.2.4 Telaah Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Periode 2025-2029

Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengidentifikasi isu-isu strategis terkait pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Laporan ini memberikan dasar bagi kebijakan dan program pembangunan daerah, agar selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG). Oleh karena itu, isu-isu dalam KLHS RPJMD perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Isu-isu strategis yang relevan dengan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan antara lain:

No	Isu Strategis	Keterkaitan dengan SDGs & KLHS
1	Kesenjangan akses informasi dan infrastruktur TIK antarwilayah (perkotaan vs. pedesaan/terpencil)	SDG 9 (Infrastruktur), SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan); KLHS: pemerataan akses dan keadilan digital
2	Rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat dan ASN	SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 16 (Kelembagaan); KLHS: inklusi digital untuk masyarakat rentan
3	Keterbatasan kapasitas keterbukaan informasi publik di tingkat desa dan OPD	SDG 16 (Transparansi dan Akuntabilitas); KLHS: partisipasi publik dan tata kelola yang inklusif
4	Belum optimalnya pengelolaan dan integrasi data statistik sektoral daerah	SDG 17 (Kemitraan dan Data); KLHS: perencanaan berbasis bukti dan transparan
5	Rendahnya kesadaran keamanan informasi dan penggunaan sistem persandian	SDG 16 (Keamanan Informasi); KLHS: pengelolaan risiko terhadap gangguan siber dan kebocoran data
6	Terbatasnya komunikasi publik pembangunan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah	SDG 11 (Kota Berkelanjutan), SDG 16 (Keterbukaan Informasi); KLHS: kohesi sosial, partisipasi warga
7	Masih sektoralnya pemanfaatan aplikasi dan sistem informasi pelayanan publik	SDG 9 & 16; KLHS: efisiensi layanan publik dan pengurangan duplikasi sistem

2.2.2.5 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Salah satu komponen penting dalam RPJMD adalah identifikasi isu strategis daerah (isu regional) yang bersumber dari kondisi faktual, potensi, serta tantangan pembangunan di wilayah Kabupaten Katingan. Isu strategis tersebut

menggambarkan agenda prioritas yang harus ditangani secara terencana dan terpadu oleh seluruh Perangkat Daerah. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Isu strategis daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Katingan dan perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan Perangkat Daerah agar tercipta keselarasan arah kebijakan dan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun isu strategis daerah yang relevan antara lain sebagai berikut:

No	Isu Strategis Daerah dalam RPJMD	Relevansi dengan Tugas dan Fungsi Diskominfostandi
1	Keterbatasan Infrastruktur Dasar, Termasuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Penyediaan dan penguatan infrastruktur TIK untuk pelayanan publik dan akses informasi yang merata
2	Ketimpangan Akses dan Kualitas Layanan Publik antar Wilayah (terutama daerah terpencil dan pedalaman)	Penguatan komunikasi publik berbasis teknologi untuk menjangkau daerah sulit akses
3	Lemahnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan, dan Berbasis Data	Penguatan sistem informasi pemerintahan, keterbukaan informasi publik, dan statistik sektoral
4	Rendahnya Literasi Digital dan Kesiapan SDM dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pengembangan literasi digital masyarakat dan ASN serta peningkatan kompetensi TIK
5	Masih Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan Daerah	Optimalisasi komunikasi publik dan media informasi untuk mendorong partisipasi dan kesadaran masyarakat
6	Ancaman Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Penguatan sistem keamanan informasi dan implementasi persandian untuk menjaga integritas data pemerintahan
7	Keterbatasan Koordinasi dan Integrasi Antar OPD dalam Perencanaan dan Pelayanan	Pengembangan sistem informasi terpadu dan layanan digital yang mendukung sinergi antar OPD
8	Rendahnya Ketersediaan dan Kualitas Data Sektoral untuk Perencanaan Pembangunan	Penguatan peran statistik sektoral daerah sebagai basis penyusunan kebijakan yang responsif dan adaptif
9	Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi untuk Mendukung Inovasi Daerah	Pemanfaatan inovasi digital dan aplikasi layanan publik untuk mendorong transformasi digital daerah

2.2.2.6 Potensi Daerah

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, potensi daerah menjadi salah satu sumber utama dalam perumusan isu strategis. Pemanfaatan potensi daerah secara optimal tidak hanya mendukung percepatan pembangunan, tetapi juga mendorong kemandirian dan daya saing daerah. Oleh karena itu, potensi unggulan daerah perlu diidentifikasi sebagai isu strategis yang dapat diarahkan menjadi kekuatan pembangunan. Adapun potensi daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan antara lain:

No	Potensi Daerah	Kesesuaian dengan Fungsi Diskominfostandi
1	Wilayah Luas dengan Potensi Pengembangan Infrastruktur TIK	Dapat mendukung pemerataan jaringan internet dan akses informasi di wilayah pedalaman dan desa.
2	Ketersediaan SDM Muda dan Generasi Digital (pelajar, mahasiswa, komunitas IT)	Menjadi sasaran strategis program literasi digital, pelatihan TIK, dan pengembangan inovasi lokal.
3	Pertumbuhan Komunitas Kreatif dan Media Lokal	Mendukung penguatan komunikasi publik dan kolaborasi penyebarluasan informasi pembangunan.
4	Potensi Data Statistik dari Sektor Unggulan (pertanian, kehutanan, UMKM)	Menjadi sumber data sektoral untuk penguatan basis perencanaan dan kebijakan berbasis data.
5	Adanya Desa Digital atau Rintisan Smart Village	Peluang memperluas program transformasi digital hingga tingkat desa dan pelayanan publik digital.
6	Kerja sama dengan Penyedia Layanan TIK dan Operator Telekomunikasi	Mendukung akselerasi perluasan jaringan, pembangunan BTS, dan integrasi sistem layanan daerah.
7	Keberadaan Layanan Data Center Provinsi/Kementerian	Potensi integrasi dan interoperabilitas layanan serta peningkatan keamanan informasi pemerintah.

No	Potensi Daerah	Kesesuaian dengan Fungsi Diskominfo Standi
8	Pertumbuhan Ekonomi Digital di Kalimantan Tengah	Mendorong partisipasi Katingan dalam ekosistem digital regional (UMKM online, konten lokal, dll).
9	Kemitraan Strategis dengan Lembaga Statistik dan Akademisi	Mendukung peningkatan kualitas statistik sektoral dan riset pembangunan daerah berbasis data.

Sebagai tindak lanjut dari hasil telaah terhadap berbagai sumber yang telah dijelaskan, perlu dilakukan integrasi untuk mengidentifikasi isu strategis perangkat daerah secara komprehensif. Proses integrasi ini mencakup isu global, potensi daerah, permasalahan pelayanan, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, KLHS RPJMD, RPJMD Kabupaten Katingan dan dokumen perencanaan lainnya. Rincian hasil integrasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7

Perumusan Isu Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Wilayah luas dan potensi pengembangan infrastruktur TIK	Belum meratanya jaringan komunikasi dan akses internet	Kesenjangan akses informasi dan infrastruktur TIK	Keadilan akses digital	Transformasi digital, inklusi TIK	Pemerataan infrastruktur digital di wilayah pedesaan	Pemerataan layanan komunikasi dan internet hingga pelosok desa
Tumbuhnya komunitas kreatif dan media lokal	Rendahnya partisipasi publik dalam komunikasi pembangunan	Minimnya pelibatan masyarakat dalam komunikasi kebijakan	Partisipasi masyarakat	Penguatan komunikasi publik	Peningkatan keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat	Penguatan komunikasi publik dan literasi media
Ketersediaan data sektoral dari sektor unggulan daerah	Belum optimalnya pemanfaatan data dalam pengambilan kebijakan	Lemahnya integrasi data sektoral berbasis spasial	Data-driven governance	Satu Data Indonesia, Tata Kelola Data	Penguatan sistem statistik sektoral daerah	Optimalisasi pemanfaatan data statistik sektoral dalam perencanaan

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Komunitas digital dan generasi muda (digital native)	Literasi digital masyarakat masih rendah	Kesenjangan kapasitas digital antarkelompok masyarakat	Inklusivitas SDM digital	Peningkatan literasi digital nasional	Gerakan Nasional Literasi Digital, Program Desa Digital	Peningkatan literasi digital masyarakat secara merata
Tersedianya kanal layanan publik digital dan kanal aduan masyarakat (media sosial, SP4N-LAPOR)	Kurangnya kecepatan respon layanan digital	Responsivitas pemerintah terhadap aspirasi publik	Pemerintahan adaptif digital	SPBE, Reformasi Birokrasi Digital	Akselerasi pelayanan publik berbasis digital	Peningkatan kualitas layanan publik melalui kanal digital dan aplikasi

Berdasarkan hasil integrasi berbagai sumber perumusan isu strategis, sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebelumnya, telah teridentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan. Isu-isu tersebut merepresentasikan kondisi aktual yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pemenuhan mandat Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan. Isu strategis ini selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam perumusan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan. Uraian lebih lanjut mengenai isu strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan disajikan sebagai berikut:

1. Kesenjangan Akses dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

- o Masih terdapat wilayah yang belum terlayani secara memadai oleh jaringan komunikasi dan internet, khususnya di daerah pelosok dan pedalaman. Hal ini menghambat pemerataan informasi, layanan publik berbasis digital, serta transformasi digital di seluruh wilayah Kabupaten Katingan.

2. Rendahnya Literasi Digital Masyarakat

- o Meskipun penggunaan perangkat digital semakin meningkat, kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi secara produktif, aman, dan bertanggung jawab masih rendah. Hal ini berpotensi meningkatkan kesenjangan digital (digital divide) dan menyulitkan adopsi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

3. Kurangnya Partisipasi Publik dalam Komunikasi Pembangunan

- o Minimnya pelibatan masyarakat dalam proses komunikasi pembangunan dan kebijakan menyebabkan rendahnya pemahaman, dukungan, serta keterlibatan warga terhadap program-program pemerintah daerah.

4. Belum Optimalnya Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral

- Sistem pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data sektoral lintas perangkat daerah belum terintegrasi secara baik, sehingga menghambat pengambilan keputusan yang berbasis bukti (evidence-based policy) dan melemahkan penerapan prinsip Satu Data Indonesia di daerah.

5. Kualitas Pelayanan Informasi Publik yang Belum Maksimal

- Masih terdapat keterbatasan dalam menyampaikan informasi secara cepat, akurat, dan transparan kepada publik. Hal ini berdampak pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik serta persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas dan responsivitas pemerintah daerah.

6. Belum Maksimalnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

- Perlindungan data dan informasi strategis pemerintah daerah masih memiliki celah keamanan, terutama dalam sistem elektronik, sehingga berisiko terhadap kebocoran data dan serangan siber.

7. Pemanfaatan Kanal Digital untuk Pelayanan Publik Belum Optimal

- Kanal layanan digital seperti website, media sosial, dan SP4N-LAPOR belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Visi Katingan yang tercantum dalam RPJMD Katingan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:



Adapun misi Katingan dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:



Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan Kabupaten berperan dalam mendukung misi ke-4, tujuan Meningkatkan tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik yang berintegritas, berdampak, responsif dan aksesibel, dan sasaran tercapainya

optimalisasi aksesibilitas SPBE/Indeks Pemerintah Digital (PEMDI) dari RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan, yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

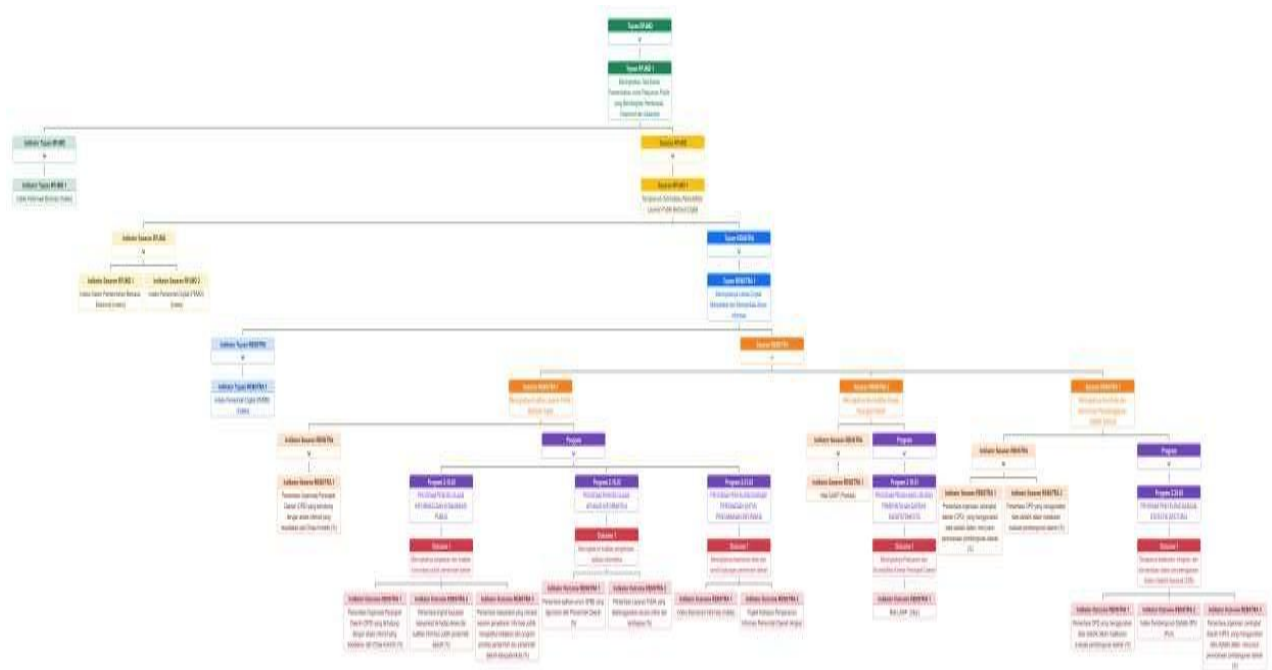
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tercapainya optimalisasi aksesibilitas layanan publik berbasis digital	Meningkatnya Literasi Digital Masyarakat dan Memperluas Akses Informasi	Meningkatnya literasi digital masyarakat dan pemerataan akses TIK di seluruh wilayah Kabupaten Katingan.	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Katingan	41	41,7	42	42,6	43	43,7	
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,26	-	-	-	-	-	
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik digital yang responsif, transparan, dan berbasis data.	Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)	-	1,8	1,9	2	2,1	2,2	
		Terjaminnya keterbukaan informasi publik yang akurat, mudah diakses, dan tepat waktu oleh masyarakat.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	91	91,5	92	92,5	93	93,5	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Digital	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	82	85	87	90	92	95	
			Persentase desa / kelurahan terlayani akses internet yang baik	82	83	84	85	86	87	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Tersedianya layanan informasi publik yang terbuka, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat.	Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi SDM Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi	400	410	420	430	440	450	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Predikat)	70.96	71.00	72.00	73.00	74.00	70.96	

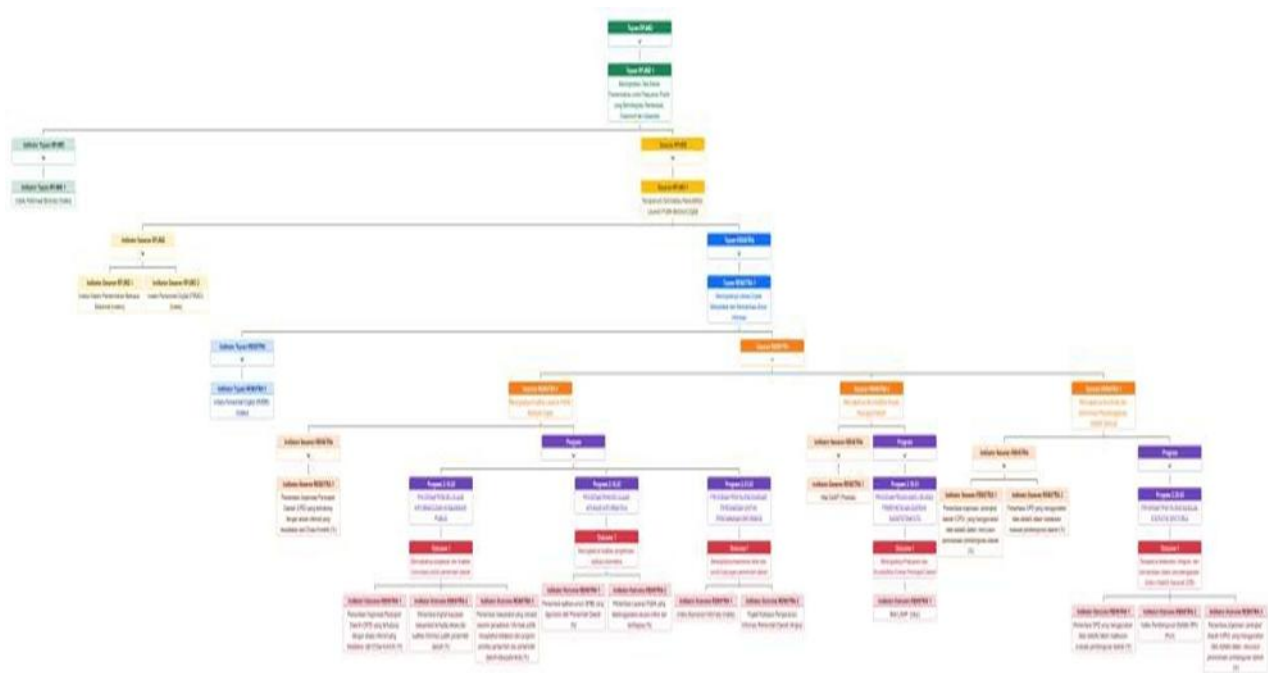
Perumusan tujuan dan sasaran di atas juga didasarkan pada pendekatan *logical framework* dan pohon kinerja. Berikut ini disajikan gambaran mengenai *logical framework* dan pohon kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan, yang merupakan alat untuk memetakan hubungan antara input, output, outcome, dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara sistematis dan terukur.

LOGICAL FRAMEWORK DISKOMINFOSTANDI KAB. KATINGAN



Gambar 3.1 *Logical Framework* Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan

POHON KINERJA DISKOMINFOSTANDI KAB. KATINGAN



Gambar 3.2 Pohon Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1 Strategi

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/subkegiatan, guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan. Selain itu, strategi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan juga disusun berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Berikut ini adalah proses perumusan strategi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan, yang meliputi antara lain:

Tabel 3.2
Penentuan Strategi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan
Persandian Kabupaten Katingan

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
1	Belum optimalnya keterbukaan informasi publik	Meningkatkan kualitas layanan informasi publik	Penguatan kelembagaan PPID dan pemanfaatan media digital
2	Rendahnya literasi digital masyarakat	Meningkatkan literasi digital masyarakat	Kolaborasi dengan komunitas/pendidikan dalam edukasi digital
3	Infrastruktur TIK belum merata	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK	Perluasan jaringan internet dan pemanfaatan TIK desa
4	Pemanfaatan data sektoral belum maksimal	Meningkatkan integrasi dan pemanfaatan data sektoral	Penguatan tata kelola data dan sistem statistik sektoral daerah

3.2.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan. Selain itu arah kebijakan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Kabupaten Katingan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	AKAR MASALAH	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Urusan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)					
	Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Digitalisasi pelayanan publik daerah	Integrasi aplikasi layanan daerah melalui dashboard SPBE	Layanan digital belum terintegrasi antar-OPD	Penguatan ekosistem layanan digital pemerintah	
	NSPK pembangunan infrastruktur TIK daerah	Pemerataan infrastruktur dan literasi digital	Pembangunan BTS/desa digital dan wifi publik	Infrastruktur TIK belum merata hingga pelosok	Pemerataan akses TIK dan peningkatan inklusi digital	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	AKAR MASALAH	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
	Program Nasional Literasi Digital (Kominformo RI)	Peningkatan kualitas SDM digital	Sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan literasi digital	Minimnya literasi digital masyarakat	Penguatan budaya digital masyarakat	
2	Urusan Komunikasi dan Informasi Publik					
	Pelaksanaan KIP sesuai UU 14/2008 dan PPID	Penguatan transparansi & partisipasi publik	Optimalisasi peran PPID utama dan pembantu	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik	Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	
	Penguatan layanan komunikasi publik digital	Pemerataan akses informasi pembangunan	Penyediaan media informasi berbasis desa dan daring	Informasi pembangunan belum menjangkau semua wilayah	Penyebarluasan informasi pembangunan	
3	Urusan Statistik Sektoral					
	Implementasi Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019)	Penguatan tata kelola data pembangunan	Penyusunan metadata dan penguatan Wali Data OPD	Data sektoral belum lengkap dan tidak terstandar	Penataan dan standarisasi statistik sektoral daerah	
	Pedoman pelatihan SDM statistik daerah dari BPS	Peningkatan kapasitas perencanaan berbasis data	Pelatihan fungsional statistik dasar bagi ASN OPD	Keterbatasan kapasitas pengelola data statistik OPD	Penguatan kompetensi SDM statistik sektor publik	
4	Urusan Persandian					
	Implementasi kebijakan keamanan siber nasional oleh BSSN	Penguatan sistem keamanan informasi daerah	Penerapan sistem pengamanan informasi dan enkripsi	Ancaman kebocoran data dan serangan siber	Membangun sistem persandian dan keamanan siber daerah	
	Sertifikasi teknis keamanan informasi BSSN	Peningkatan kapasitas SDM bidang persandian	Pelatihan teknis dan sosialisasi keamanan digital	SDM pengelola persandian masih minim	Pengembangan SDM persandian dan SOP pengamanan data	

3.2.3 Penahapan Pembangunan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang:

Tabel 3.4
Pentahapan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Pondasi Transformasi Digital	Peningkatan Infrastruktur dan Sistem Layanan	Optimalisasi Layanan Digital dan Tata Kelola Data	Pemberdayaan Masyarakat Digital	Kemandirian dan Inovasi Berbasis Digital

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab III (Tiga) dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini. Program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan, yang merupakan hasil dari *cascading* tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian *outcome* dan *output* yang diharapkan.

Tabel 4.1

Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian							
- Tercapainya optimalisasi aksesibilitas layanan publik berbasis digital	Meningkatnya Literasi Digital Masyarakat dan Memperluas Akses Informasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik digital yang responsif, transparan, dan berbasis data.			● Indeks IMDI ● Indeks Pemerintah Digital (PEMDI) ● Indek Keterbukaan Informasi Publik		● IKD ● IKU ● IKD
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai LAKIP		
		Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai LAKIP	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Dokumen Perencanaan yang Tersusun Tepat Waktu dan Berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Sesuai bidangnya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.16.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.16.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya barang milik daerah untuk mendukung operasional perangkat daerah.	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.16.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya layanan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan tepat waktu.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan untuk mendukung operasional perangkat daerah.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral			Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		
					Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Tersedianya layanan statistik sektoral melalui Portal Satu Data Katingan yang dimanfaatkan OPD	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Jumlah perangkat daerah yang menyampaikan data statistik sektoral secara berkala	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Digital			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Terselenggaranya layanan PPID dan kanal SP4N-LAPOR	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Terbangunnya sistem layanan publik digital terintegrasi antar-OPD melalui portal pelayanan elektronik	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemerintah Daerah	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
					Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Terselenggaranya sistem keamanan informasi dan persandian termasuk SOP, audit TIK, dan enkripsi data instansi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Jumlah media yang digunakan untuk komunikasi publik	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Konten Informasi Publik	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media	
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
					Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	2.16.02.2.01.0016 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
					Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
					Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	2.16.02.2.01.0022 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	
					Jumlah Konten Informasi Publik	2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten	
					Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu, efektif, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	2.16.03.2.02.0026 - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	
					Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
					Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	
					Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
			Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Terselenggaranya sistem pengamanan informasi pemerintah daerah yang mendukung tata kelola Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaannya:

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Kabupaten Katingan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				11.258.334.951		11.884.727.000		12.555.890.000		13.275.504.000		14.047.570.000				
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.447.615.202		6.641.043.000		6.840.274.000		7.045.483.000		7.256.847.000				
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	72,05	73,05	6.447.615.202	74	6.641.043.000	74,5	6.840.274.000	75	7.045.483.000	75,5	7.256.847.000	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				109.205.099		124.000.000		140.000.000		150.000.000		160.000.000	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			
Dokumen Perencanaan yang Tersusun Tepat Waktu dan Berkualitas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	53.220.449,00	1	54.000.000,00	1	55.000.000,00	1	56.000.000,00	1	57.000.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	55.984.650,00	5	60.000.000,00	5	65.000.000,00	5	70.000.000,00	5	75.000.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				55.984.650,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	55.984.650,00	5	60.000.000,00	5	65.000.000,00	5	70.000.000,00	5	75.000.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				53.220.449,00		54.000.000,00		55.000.000,00		56.000.000,00		57.000.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	53.220.449,00	1	54.000.000,00	1	55.000.000,00	1	56.000.000,00	1	57.000.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.477.270.550,00		4.477.360.000,00		4.477.461.000,00		4.477.562.000,00		4.477.663.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	92.210.850,00	1	92.300.000,00	1	92.400.000,00	1	92.500.000,00	1	92.600.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	12	4.334.000.000,00	12	4.334.000.000,00	12	4.334.000.000,00	12	4.334.000.000,00	12	4.334.000.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD	12	12	51.059.700,00	12	51.060.000,00	12	51.061.000,00	12	51.062.000,00	12	51.063.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.334.000.000,00		4.334.000.000,00		4.334.000.000,00		4.334.000.000,00		4.334.000.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	12	4.334.000.000,00	12	4.334.000.000,00	12	4.334.000.000,00	12	4.334.000.000,00	12	4.334.000.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				92.210.850,00		92.300.000,00		92.400.000,00		92.500.000,00		92.600.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	92.210.850,00	1	92.300.000,00	1	92.400.000,00	1	92.500.000,00	1	92.600.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				51.059.700,00		51.060.000,00		51.061.000,00		51.062.000,00		51.063.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	12	12	51.059.700,00	12	51.060.000,00	12	51.061.000,00	12	51.062.000,00	12	51.063.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				152.550.000,00		152.550.000,00		152.550.000,00		152.550.000,00		152.550.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Sesuai bidangnya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	15	75.000.000,00	15	75.000.000,00	15	75.000.000,00	15	75.000.000,00	15	75.000.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	77.550.000,00	1	77.550.000,00	1	77.550.000,00	1	77.550.000,00	1	77.550.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				77.550.000,00		77.550.000,00		77.550.000,00		77.550.000,00		77.550.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	77.550.000,00	1	77.550.000,00	1	77.550.000,00	1	77.550.000,00	1	77.550.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	15	15	75.000.000,00	15	75.000.000,00	15	75.000.000,00	15	75.000.000,00	15	75.000.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				815.027.392,00		815.203.942,00		815.318.942,00		815.434.551,00		815.540.559,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	125.170.180,00	12	125.173.180,00	12	125.174.180,00	12	125.175.180,00	12	125.176.180,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	4	4	5.586.000,00	4	5.586.000,00	4	5.586.000,00	4	5.586.000,00	4	5.586.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	88.388.700,00	12	88.400.000,00	12	88.410.000,00	12	88.412.001,00	12	88.413.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	50	281.040.000,00	50	281.200.000,00	50	281.300.000,00	50	281.400.000,00	50	281.500.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	102.883.512,00	12	102.885.512,00	12	102.888.512,00	12	102.895.120,00	12	102.896.129,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	47.927.750,00	12	47.928.000,00	12	47.928.000,00	12	47.930.000,00	12	47.931.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	164.031.250,00	12	164.031.250,00	12	164.032.250,00	12	164.036.250,00	12	164.038.250,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				47.927.750,00		47.928.000,00		47.928.000,00		47.930.000,00		47.931.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	47.927.750,00	12	47.928.000,00	12	47.928.000,00	12	47.930.000,00	12	47.931.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				164.031.250,00		164.031.250,00		164.032.250,00		164.036.250,00		164.038.250,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	164.031.250,00	12	164.031.250,00	12	164.032.250,00	12	164.036.250,00	12	164.038.250,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				102.883.512,00		102.885.512,00		102.888.512,00		102.895.120,00		102.896.129,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	102.883.512,00	12	102.885.512,00	12	102.888.512,00	12	102.895.120,00	12	102.896.129,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				125.170.180,00		125.173.180,00		125.174.180,00		125.175.180,00		125.176.180,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	125.170.180,00	12	125.173.180,00	12	125.174.180,00	12	125.175.180,00	12	125.176.180,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				88.388.700,00		88.400.000,00		88.410.000,00		88.412.001,00		88.413.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	88.388.700,00	12	88.400.000,00	12	88.410.000,00	12	88.412.001,00	12	88.413.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.586.000,00		5.586.000,00		5.586.000,00		5.586.000,00		5.586.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	4	5.586.000,00	4	5.586.000,00	4	5.586.000,00	4	5.586.000,00	4	5.586.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				281.040.000,00		281.200.000,00		281.300.000,00		281.400.000,00		281.500.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	50	281.040.000,00	50	281.200.000,00	50	281.300.000,00	50	281.400.000,00	50	281.500.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				47.584.661,00		42.523.760,00		36.307.760,00		30.091.151,00		23.884.143,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Tersedianya barang milik daerah untuk mendukung operasional perangkat daerah.	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	47.584.661,00	1	42.523.760,00	1	36.307.760,00	1	30.091.151,00	1	23.884.143,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				47.584.661,00		42.523.760,00		36.307.760,00		30.091.151,00		23.884.143,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	47.584.661,00	1	42.523.760,00	1	36.307.760,00	1	30.091.151,00	1	23.884.143,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				232.585.000,00		232.585.000,00		232.585.000,00		232.585.000,00		232.585.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Tersedianya layanan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan tepat waktu.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	160.085.000,00	12	160.085.000,00	12	160.085.000,00	12	160.085.000,00	12	160.085.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				160.085.000,00		160.085.000,00		160.085.000,00		160.085.000,00		160.085.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	160.085.000,00	12	160.085.000,00	12	160.085.000,00	12	160.085.000,00	12	160.085.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				613.392.500,00		613.392.500,00		613.392.500,00		613.392.500,00		613.392.500,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Terpeliharanya barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan untuk mendukung operasional perangkat daerah.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	17	413.392.500,00	17	413.392.500,00	17	413.392.500,00	17	413.392.500,00	17	413.392.500,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				413.392.500,00		413.392.500,00		413.392.500,00		413.392.500,00		413.392.500,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	17	413.392.500,00	17	413.392.500,00	17	413.392.500,00	17	413.392.500,00	17	413.392.500,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				910.000.049		991.900.000		1.081.171.000		1.178.476.000		1.284.539.000		
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	100	100	910.000.049	100	991.900.000	100	1.081.171.000	100	1.178.476.000	100	1.284.539.000	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				910.000.049		991.900.000		1.081.171.000		1.178.476.000		1.284.539.000	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Jumlah media yang digunakan untuk komunikasi publik	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasi kan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	3	3	90.000.000,00	3	90.000.000,00	3	90.000.000,00	3	90.000.000,00	3	90.000.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	80	85	131.039.998,00	90	131.039.998,00	95	131.039.998,00	100	131.039.998,00	100	131.039.998,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	4	4	90.000.000,00	4	90.000.000,00	4	90.000.000,00	4	90.000.000,00	4	90.000.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1	1	102.500.000,00	1	102.500.000,00	1	102.500.000,00	1	102.500.000,00	1	102.500.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/uknis	5	5	120.000.000,00	5	120.000.000,00	5	120.000.000,00	5	120.000.000,00	5	120.000.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	Jumlah Konten Informasi Publik	1230	1230	100.000.000,00	1230	100.000.000,00	1230	100.000.000,00	1230	100.000.000,00	1230	100.000.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	5	5	66.450.061,00	5	66.450.061,00	5	66.450.061,00	5	66.450.061,00	5	66.450.061,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	8	8	50.009.990,00	8	50.009.990,00	8	50.009.990,00	8	50.009.990,00	8	50.009.990,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media				50.009.990,00		50.009.990,00		50.009.990,00		50.009.990,00		50.009.990,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	8	8	50.009.990,00	8	50.009.990,00	8	50.009.990,00	8	50.009.990,00	8	50.009.990,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasi kan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	3	3	90.000.000,00	3	90.000.000,00	3	90.000.000,00	3	90.000.000,00	3	90.000.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.02.2.01.0016 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian	1	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Komunikasi dan Informatika													
2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik				102.500.000,00		102.500.000,00		102.500.000,00		102.500.000,00		102.500.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1	1	102.500.000,00	1	102.500.000,00	1	102.500.000,00	1	102.500.000,00	1	102.500.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik				85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi				131.039.998,00		131.039.998,00		131.039.998,00		131.039.998,00		131.039.998,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	80	85	131.039.998,00	90	131.039.998,00	95	131.039.998,00	100	131.039.998,00	100	131.039.998,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik				120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5	5	120.000.000,00	5	120.000.000,00	5	120.000.000,00	5	120.000.000,00	5	120.000.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.02.2.01.0022 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik				90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	4	4	90.000.000,00	4	90.000.000,00	4	90.000.000,00	4	90.000.000,00	4	90.000.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	1230	1230	100.000.000,00	1230	100.000.000,00	1230	100.000.000,00	1230	100.000.000,00	1230	100.000.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik				66.450.061,00		66.450.061,00		66.450.061,00		66.450.061,00		66.450.061,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatiha n	5	5	66.450.061,00	5	66.450.061,00	5	66.450.061,00	5	66.450.061,00	5	66.450.061,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				3.900.719.700		4.251.784.000		4.634.445.000		5.051.545.000		5.506.184.000		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	3.900.719.700	100	4.251.784.000	100	4.634.445.000	100	5.051.545.000	100	5.506.184.000	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemerintah Daerah	100	100		100		100		100		2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				3.900.719.700,00		3.900.719.700,00		3.900.719.700,00		3.900.719.700,00		3.900.719.700,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu, efektif, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggara an SPBE	1	1	54.200.000,00	1	54.200.000,00	1	54.200.000,00	1	54.200.000,00	1	54.200.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	30	30	3.094.239.610,00	30	3.094.239.610,00	30	3.094.239.610,00	30	3.094.239.610,00	30	3.094.239.610,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1	1	147.600.000,00	1	147.600.000,00	1	147.600.000,00	1	147.600.000,00	1	147.600.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1	1	102.010.000,00	1	102.010.000,00	1	102.010.000,00	1	102.010.000,00	1	102.010.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1	1	48.400.000,00	1	48.400.000,00	1	48.400.000,00	1	48.400.000,00	1	48.400.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1	1	93.500.000,00	1	93.500.000,00	1	93.500.000,00	1	93.500.000,00	1	93.500.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan	1	1	360.770.090,00	1	360.770.090,00	1	360.770.090,00	1	360.770.090,00	1	360.770.090,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE													
2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				102.010.000,00		102.010.000,00		102.010.000,00		102.010.000,00		102.010.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1	1	102.010.000,00	1	102.010.000,00	1	102.010.000,00	1	102.010.000,00	1	102.010.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.03.2.02.0026 - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				93.500.000,00		93.500.000,00		93.500.000,00		93.500.000,00		93.500.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggara an Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1	1	93.500.000,00	1	93.500.000,00	1	93.500.000,00	1	93.500.000,00	1	93.500.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE				360.770.090,00		360.770.090,00		360.770.090,00		360.770.090,00		360.770.090,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah,	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi	1	1	360.770.090,00	1	360.770.090,00	1	360.770.090,00	1	360.770.090,00	1	360.770.090,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE													
2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				54.200.000,00		54.200.000,00		54.200.000,00		54.200.000,00		54.200.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggara an SPBE	1	1	54.200.000,00	1	54.200.000,00	1	54.200.000,00	1	54.200.000,00	1	54.200.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet				3.094.239.610,00		3.094.239.610,00		3.094.239.610,00		3.094.239.610,00		3.094.239.610,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	30	30	3.094.239.610,00	30	3.094.239.610,00	30	3.094.239.610,00	30	3.094.239.610,00	30	3.094.239.610,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				48.400.000,00		48.400.000,00		48.400.000,00		48.400.000,00		48.400.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1	1	48.400.000,00	1	48.400.000,00	1	48.400.000,00	1	48.400.000,00	1	48.400.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas				147.600.000,00		147.600.000,00		147.600.000,00		147.600.000,00		147.600.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggara an Kabupaten/Kot a Cerdas	1	1	147.600.000,00	1	147.600.000,00	1	147.600.000,00	1	147.600.000,00	1	147.600.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				385.600.000		420.304.000		458.131.000		499.363.000		544.305.000		
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				385.600.000		420.304.000		458.131.000		499.363.000		544.305.000		
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		2,60	385.600.000	2,65	420.304.000	2,70	458.131.000	2,75	499.363.000	2,80	544.305.000	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				385.600.000		420.304.000		458.131.000		499.363.000		544.305.000	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			
Jumlah perangkat daerah yang menyampaikan data statistik sektoral secara berkala	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilita s data dan kode referensi dan/atau data induk	100	100	192.800.000,00	100	192.800.000,00	100	192.800.000,00	100	192.800.000,00	100	192.800.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100	100	192.800.000,00	100	192.800.000,00	100	192.800.000,00	100	192.800.000,00	100	192.800.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			
2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia				192.800.000,00		192.800.000,00		192.800.000,00		192.800.000,00		192.800.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			
Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilita s data dan kode referensi dan/atau data induk	100	100	192.800.000,00	100	192.800.000,00	100	192.800.000,00	100	192.800.000,00	100	192.800.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			
2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral				192.800.000,00		192.800.000,00		192.800.000,00		192.800.000,00		192.800.000,00	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100	100	192.800.000,00	100	192.800.000,00	100	192.800.000,00	100	192.800.000,00	100	192.800.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				204.400.049		222.796.000		242.847.000		264.703.000		288.527.000		
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				204.400.049		222.796.000		242.847.000		264.703.000		288.527.000		
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100	100	204.400.049	100	222.796.000	100	242.847.000	100	264.703.000	100	288.527.000	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				204.400.049		222.796.000		242.847.000		264.703.000		288.527.000	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Terselenggaranya sistem pengamanan informasi pemerintah daerah yang mendukung tata kelola Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang	1	1	204.400.049	1	222.796.000	1	242.847.000	1	264.703.000	1	288.527.000	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggara an persandian													
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	1	102.200.024,50	1	102.200.024,50	1	102.200.024,50	1	102.200.024,50	1	102.200.024,50	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				102.200.024,50		102.200.024,50		102.200.024,50		102.200.024,50		102.200.024,50	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	1	102.200.024,50	1	102.200.024,50	1	102.200.024,50	1	102.200.024,50	1	102.200.024,50	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				102.200.024,50		102.200.024,50		102.200.024,50		102.200.024,50		102.200.024,50	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan	1	1	102.200.024,50	1	102.200.024,50	1	102.200.024,50	1	102.200.024,50	1	102.200.024,50	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggara an persandian													

Sumber: RPJMD

Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan kegiatan serta sub kegiatan yang akan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi outcome yang terukur dan terarah.

Tabel 4.3

**Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah**

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE - Penyediaan Akses Internet	tagging program unggulan Kepala Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
			- Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
2	Program Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Relasi Media - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik - Pelayanan Informasi Publik - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik - Diseminasi Informasi - Pengelolaan Media Komunikasi Publik - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik - Penyusunan Konten - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	tagging program unggulan Kepala Daerah
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	tagging program unggulan Kepala Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
		dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Sub Kegiatan ▪ Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia ▪ Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan ▪ Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik ▪ Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	<i>tagging</i> program unggulan Kepala Daerah

Sumber RPJMD

*Keterangan dapat diisi *tagging* program unggulan Kepala Daerah.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan dalam melaksanakan urusan pemerintahan. IKU bersifat *outcome-oriented* dan digunakan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama perangkat daerah terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan dan Indikator Kinerja Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Katingan	Indeks	41	41,7	42	42,6	43	43,7	Indikator Kinerja Daerah (IKD)

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,26	-	-	-	-	-	Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai tahun 2025
3	Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)	Indeks	-	1,8	1,9	2	2,1	2,2	Indikator Kinerja Utama (IKU) dari tahun 2026
4	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	91	91,5	92	92,5	93	93,5	Indikator Kinerja Daerah (IKD)

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan Kabupaten telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut ini adalah rincian indikator kinerja kunci (IKK) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan
Persandian Kabupaten Katingan

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Urusan Komunikasi dan Informatika									
1.	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase	100	100	100	100	100	100	Tidak termasuk kecamatan
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase	82	85	87	90	92	95	
3	Persentase desa / kelurahan terlayani akses internet yang baik	Persentase	82	83	84	85	86	87	
4	Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan	Persentase	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Urusan Statistik									
1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	
Urusan Persandian									
1	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	400	410	420	430	440	450	

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan berisi perencanaan yang merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, serta rencana pendanaan indikatif.

Rencana Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan ini diharapkan dapat memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana kinerja, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan. pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan Tahun 2025-2029 memerlukan dukungan serta komitmen dari pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab institusinya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan. Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antarperangkat daerah, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Katingan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan. Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan. Tahun 2025–2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2045 serta RPJMD Kabupaten Katingan periode berjalan.
2. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini, dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara input, output, dan outcome.
3. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan.
4. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang sahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.

5. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan. Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.